



Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam dan Implikasinya terhadap Stabilitas Ekonomi

Tia Aprilia

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Ahmad Wahyudi Zein, M.E.I

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Sasmita Pohan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Longgom Nauli Sihombing

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Zidan Choiril Akmal

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Korespondensi penulis: apriliatia453@gmail.com

Abstrak. *Inflation is a macroeconomic phenomenon that has a significant repercussions on a nation's economic stability, including a decline in purchasing power, unequal income distribution, and economic uncertainty. In conventional economics, inflation is generally understood as a general and sustained upward movement in the prices of goods and services. Meanwhile, Islamic macroeconomics views inflation not only as a monetary issue but also as a result of deviations from moral values, imbalances between the real and monetary sectors, and economic practices that are inconsistent with the principles of justice and welfare. This article aims to analyze the concept of inflation from an Islamic macroeconomic perspective and the consequences for economic stability. The study adopts a literature review methodology with a descriptive approach-analytical approach to classical and contemporary Islamic economic literature. The results indicate that Islamic economics emphasizes price stability through strengthening the real sector, prohibiting usury, controlling speculation, and the involvement of the state in preserving, economic justice. Thus, the application of Islamic economic principles is expected to minimize inflationary pressures and create sustainable economic stability.*

Keywords: *Economic Stability; Inflation; Islamic Macroeconomics; Islamic Monetary Policy*

Abstrak. Inflasi merupakan fenomena makroekonomi yang menimbulkan pengaruh yang nyata terhadap stabilitas ekonomi negara, termasuk penurunan daya beli masyarakat, ketimpangan distribusi pendapatan, dan ketidakpastian ekonomi. Dalam ekonomi konvensional, inflasi umumnya merupakan peningkatan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Sementara itu, ekonomi makro Islam memandang inflasi tidak hanya sebagai persoalan moneter, tetapi juga sebagai akibat dari penyimpangan nilai moral, ketidakseimbangan sektor riil dan moneter, serta praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep inflasi dalam perspektif ekonomi makro Islam serta implikasinya terhadap stabilitas ekonomi. Penelitian dilaksanakan menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap berbagai referensi yang terkait ekonomi Islam klasik maupun kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi Islam menekankan stabilitas harga melalui penguatan sektor riil, larangan riba, pengendalian spekulasi, serta peran negara dalam menjaga keadilan ekonomi. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam diharapkan mampu meminimalkan tekanan inflasi dan menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Ekonomi Makro Islam; Inflasi; Kebijakan Moneter Islam; Stabilitas Ekonomi*

PENDAHULUAN

Inflasi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kesehatan dan stabilitas perekonomian makro suatu negara. Inflasi yang terjadi secara moderat masih dapat ditoleransi dan bahkan dianggap sebagai tanda adanya pertumbuhan ekonomi. Namun, ketika inflasi berada pada tingkat yang tinggi dan tidak terkendali, kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya biaya hidup, serta melemahnya nilai mata uang. Dampak ini paling dirasakan oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah, sehingga inflasi berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan memperburuk tingkat kemiskinan. Selain itu, inflasi yang fluktuatif juga menciptakan ketidakpastian ekonomi yang dapat menghambat investasi dan pertumbuhan sektor riil.

Dalam konteks negara berkembang, permasalahan inflasi cenderung bersifat struktural dan kompleks. Inflasi tidak hanya dipicu oleh peningkatan permintaan atau biaya produksi, tetapi juga oleh lemahnya kapasitas sektor produksi domestik, bergantung secara besar pada impor bahan baku maupun komoditas konsumsi, serta keterbatasan infrastruktur ekonomi. Ketergantungan impor menyebabkan perekonomian berisiko tinggi terhadap guncangan harga global dan nilai tukar mata uang. Di sisi lain, kebijakan moneter yang kurang efektif seperti ekspansi peredaran uang yang tidak seimbang dengan peningkatan produksi sering kali memperburuk tekanan inflasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa inflasi bukan sekadar persoalan moneter, melainkan juga berkaitan erat dengan struktur ekonomi dan tata kelola kebijakan negara.

Dalam perspektif ekonomi Islam, stabilitas harga memiliki posisi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan prinsip keadilan (*'adl*) dan kesejahteraan masyarakat (*falah*). Islam memandang bahwa tujuan utama aktivitas ekonomi bukan semata-mata pertumbuhan, melainkan tercapainya kemaslahatan dan terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, inflasi yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan dan ketidakadilan sosial dipandang sebagai kondisi yang harus dicegah. Stabilitas harga dalam ekonomi Islam juga berfungsi untuk melindungi hak masyarakat, terutama kelompok lemah, agar tidak dirugikan oleh fluktuasi harga yang berlebihan.

Ekonomi Islam secara tegas menolak berbagai praktik ekonomi yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan harga dan ketidakadilan, seperti *riba*, penimbunan barang (*ihtikar*), dan spekulasi berlebihan (*maysir*). Praktik *riba* mendorong pertumbuhan sektor keuangan yang tidak sejalan dengan sektor riil, sehingga meningkatkan jumlah uang beredar tanpa didukung oleh produksi barang dan jasa. Sementara itu, penimbunan dan spekulasi dapat mengganggu mekanisme pasar, menciptakan kelangkaan buatan, dan mendorong kenaikan harga yang tidak wajar. Praktik-praktik tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam Islam serta berpotensi menjadi sumber inflasi dan ketidakstabilan ekonomi.

Oleh karena itu, kajian mengenai inflasi dalam perspektif ekonomi makro Islam menjadi sangat relevan dalam menghadapi tantangan inflasi kontemporer. Pendekatan ekonomi Islam tidak hanya menawarkan instrumen teknis pengendalian inflasi, tetapi juga menekankan pentingnya nilai moral, etika, dan peran negara dalam menjaga keadilan pasar. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah seperti penguatan sektor riil, distribusi kekayaan yang adil, serta pengawasan terhadap praktik ekonomi yang

merugikan, ekonomi Islam diharapkan mampu memberikan alternatif solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam menjaga stabilitas ekonomi.

KAJIAN TEORITIS

Dalam perspektif ekonomi makro, inflasi dipahami sebagai peningkatan harga barang dan jasa secara menyeluruh yang berlangsung terus-menerus dalam periode tertentu. Inflasi tidak hanya berkaitan dengan naiknya harga pada komoditas tertentu, tetapi juga mencerminkan penurunan daya beli uang yang berdampak luas terhadap kegiatan ekonomi. Dalam teori makroekonomi konvensional, inflasi umumnya dikaitkan dengan ketidakseimbangan antara permintaan agregat dan penawaran agregat, serta pertumbuhan jumlah uang beredar yang lebih cepat dibandingkan peningkatan output riil.

Secara konseptual, inflasi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, seperti inflasi tarikan permintaan (*demand-pull inflation*) yang muncul disebabkan oleh kenaikan permintaan agregat, inflasi dorongan biaya (*cost-push inflation*) yang diakibatkan oleh bertambahnya biaya produksi, dan juga inflasi struktural banyak terjadi di negara berkembang akibat lemahnya struktur ekonomi. Inflasi yang tidak terkontrol berpotensi memberikan konsekuensi negatif, antara lain menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya ketidakpastian investasi, dan melebar-nya ketimpangan pendapatan. Karena itu, pengendalian inflasi memiliki peran penting sebagai tujuan penting dalam kebijakan makroekonomi.

Dalam ekonomi Islam, inflasi dipandang sebagai fenomena yang tidak hanya dipicu oleh faktor moneter, tetapi juga oleh aspek moral, kelembagaan, serta ketidakseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil. Dalam perspektif Islam uang digunakan sebagai media pertukaran dan pengukur nilai, bukan objek untuk memperoleh keuntungan. Oleh sebab itu, pertumbuhan uang idealnya selalu sejalan dengan aktivitas produktif di sektor riil.

Ekonomi Islam menegaskan bahwa inflasi dapat terjadi ketika ekspansi uang tidak diiringi oleh peningkatan produksi barang dan jasa. Kondisi tersebut sering diperburuk oleh praktik riba, spekulasi, dan transaksi non-produktif yang mengganggu keseimbangan ekonomi. Dengan demikian, inflasi dalam kerangka ajaran Islam, tidak sekadar dipahami sebagai persoalan ekonomi teknis, melainkan sebagai indikasi penyimpangan dari prinsip keadilan dan keseimbangan (*mīzān*).

Beberapa faktor utama penyebab inflasi menurut ekonomi Islam antara lain praktik riba yang mendorong pertumbuhan sektor keuangan tanpa dukungan sektor riil, penimbunan barang (*iḥtikār*) yang menciptakan kelangkaan buatan sehingga harga meningkat secara tidak wajar, serta spekulasi berlebihan (*maysir*) yang memicu ketidakstabilan pasar. Selain itu, lemahnya peran negara dalam pengawasan pasar turut memperbesar tekanan inflasi. Dalam tradisi ekonomi Islam, negara berperan menjaga keadilan harga melalui pengawasan pasar (*ḥisbah*), pencegahan monopoli, dan intervensi ketika terjadi distorsi.

Dalam pandangan Islam, stabilitas ekonomi tidak hanya diukur dari terkendalinya harga, tetapi juga dari terwujudnya keadilan sosial, pemerataan pendapatan, dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Stabilitas ekonomi merupakan bagian dari tujuan syariah (*maqāṣid al-sharī‘ah*), khususnya dalam menjaga harta (*ḥifz al-māl*). Inflasi yang tinggi dinilai bertentangan dengan tujuan tersebut karena dapat menggerus nilai

kekayaan dan menurunkan kesejahteraan, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Dalam perspektif Islam, ekonomi harus seimbang antara peningkatan pertumbuhan dan distribusi yang merata. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi tidak hanya difokuskan pada pengendalian inflasi secara teknis, tetapi juga pada pembangunan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berbasis sektor riil. Melalui penghapusan riba, penguatan sektor produktif, optimalisasi zakat, infak, dan wakaf, serta penerapan sistem keuangan berbasis bagi hasil, ekonomi Islam berupaya menekan inflasi sekaligus menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan, di mana bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai konsep inflasi dan stabilitas ekonomi dalam perspektif ekonomi makro Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian tidak berpijak hanya dengan pengukuran angka atau pengujian hipotesis statistik, melainkan pada penelaahan konsep, prinsip, dan pemikiran teoritis yang berkembang dalam literatur ekonomi Islam. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya menafsirkan dan menganalisis makna inflasi berdasarkan kerangka nilai dan norma syariah secara komprehensif.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur relevan, seperti buku teks ekonomi Islam, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta karya ulama klasik dan pemikir ekonomi Islam kontemporer. Literatur klasik digunakan untuk menggali landasan normatif dan filosofis ekonomi Islam, sementara literatur kontemporer dimanfaatkan untuk memahami perkembangan pemikiran dan penerapan konsep inflasi dalam konteks ekonomi modern. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan kontribusinya terhadap topik penelitian.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu menguraikan dan menjelaskan konsep-konsep inflasi, penyebab, serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi berdasarkan perspektif ekonomi Islam, kemudian menganalisis keterkaitan antar konsep tersebut secara sistematis. Tahapan analisis meliputi pengumpulan dan pengelompokan literatur, pemahaman isi dan gagasan utama, serta penarikan kesimpulan secara logis dan argumentatif. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran konseptual yang jelas mengenai inflasi dalam ekonomi makro Islam sekaligus menunjukkan implikasinya terhadap upaya menjaga stabilitas ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Inflasi

Inflasi merupakan salah satu gejala ekonomi makro yang terus menjadi sorotan dalam dinamika perekonomian dunia. Secara konseptual, inflasi merujuk pada kondisi peningkatan harga komoditas dan jasa secara keseluruhan dalam jangka waktu tertentu. Dalam perspektif ekonomi Islam, konsep inflasi pada dasarnya sejalan dengan pengertian konvensional terkait kenaikan harga yang bersifat berkelanjutan, namun dilengkapi dengan penekanan khusus pada aspek moral dan etika yang menyertai terjadinya inflasi (Amalia Shofia & Ichsan Iqbal, 2024).

Islam tidak memandang inflasi semata-mata sebagai persoalan teknis ekonomi, melainkan sebagai fenomena yang bersifat komprehensif dan sistemik. Fadilla (2017) menegaskan bahwa inflasi harus dipahami sebagai proses yang berdampak luas terhadap berbagai dimensi kehidupan ekonomi, termasuk perubahan harga relatif, tingkat bunga riil, beban pajak, serta kemampuan daya beli masyarakat. Dampak tersebut menjadikan inflasi sebagai salah satu variabel utama yang menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan moneter.

Dalam kerangka ekonomi Islam, ketidakstabilan harga akibat inflasi dipandang sebagai permasalahan yang tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial. Pendekatan Islam terhadap inflasi menekankan pentingnya keseimbangan antara efektivitas kebijakan ekonomi dan prinsip keadilan sosial. Ketidakmampuan mengendalikan inflasi dapat memperlebar kesenjangan sosial dan bertentangan dengan tujuan utama syariah (*maqāṣid al-syarī‘ah*). Oleh karena itu, pemahaman terhadap mekanisme inflasi serta alternatif penanganannya berdasarkan perspektif Islam menjadi langkah strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi tidak sekedar secara teknis, melainkan berorientasi kepada keadilan maupun kemaslahatan umat.

Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam

Dalam perspektif ekonomi makro Islam, inflasi dipandang sebagai fenomena multidimensional yang tidak semata-mata bersumber dari faktor teknis ekonomi, seperti peningkatan jumlah uang beredar atau ketidakseimbangan permintaan dan penawaran, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor moral dan kelembagaan dalam sistem ekonomi. Islam menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Ketika prinsip-prinsip tersebut dilanggar, maka berbagai distorsi ekonomi, termasuk inflasi, cenderung muncul sebagai konsekuensinya.

Praktik riba merupakan salah satu faktor kunci yang memengaruhi inflasi pada ekonomi Islam karena mendorong pertumbuhan sektor keuangan yang tidak sejalan dengan sektor riil. Riba memungkinkan akumulasi keuntungan tanpa aktivitas produktif yang nyata, sehingga menyebabkan ekspansi uang beredar yang tidak sebanding dengan pertumbuhan produksi barang dan jasa. Kondisi ini menciptakan tekanan inflasi serta memperlebar kesenjangan distribusi pendapatan. Selain itu, sistem berbasis riba cenderung memperkuat spekulasi dan ketidakstabilan pasar, yang semakin memperburuk fluktuasi harga.

Selain riba, praktik penimbunan barang (*ihtikar*) juga dipandang sebagai penyebab penting ketidakstabilan harga. Penimbunan dilakukan dengan sengaja untuk menciptakan kelangkaan buatan sehingga harga barang meningkat dan memberikan keuntungan berlebihan bagi pelaku usaha tertentu. Dalam perspektif Islam, praktik ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Dampak dari *ihtikar* adalah terganggunya mekanisme pasar yang sehat, meningkatnya harga barang kebutuhan pokok, serta melemahnya daya beli masyarakat.

Faktor lain yang turut berperan dalam memicu inflasi adalah ketidakefisienan distribusi dan lemahnya kelembagaan ekonomi. Distribusi yang tidak merata, infrastruktur yang buruk, serta minimnya pengawasan pasar dapat menyebabkan disparitas harga antarwilayah dan meningkatkan biaya ekonomi. Dalam ekonomi Islam, negara memiliki peran strategis untuk memastikan kelancaran distribusi, mencegah monopoli, dan menjaga keadilan harga melalui lembaga pengawasan pasar (*hisbah*). Ketika peran kelembagaan ini tidak berjalan optimal, tekanan inflasi menjadi semakin sulit dikendalikan dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Inflasi dalam Perspektif Islam

Para pemikir ekonomi Islam menilai bahwa inflasi membawa dampak negatif yang signifikan terhadap stabilitas perekonomian. Dampak tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa aspek utama. Pertama, inflasi mengganggu fungsi dasar uang, baik sebagai alat tukar, penyimpan nilai, alat pembayaran di muka, maupun sebagai satuan hitung. Ketika inflasi terjadi, masyarakat cenderung menghindari penyimpanan kekayaan dalam bentuk uang atau aset keuangan karena nilainya terus mengalami penurunan. Kondisi ini bahkan dapat memicu inflasi lanjutan yang bersifat berantai (*self-feeding inflation*).

Kedua, inflasi melemahkan motivasi masyarakat untuk menabung. Penurunan nilai uang menyebabkan kecenderungan menahan tabungan semakin berkurang, yang tercermin dari menurunnya kemiringan marginal terhadap tabungan.

Ketiga, inflasi justru mendorong peningkatan perilaku konsumtif, khususnya terhadap barang-barang non-esensial dan barang mewah, sehingga kecenderungan marginal untuk mengonsumsi (marginal propensity to consume) mengalami peningkatan.

Keempat, inflasi cenderung mendorong pergeseran alokasi investasi ke arah kegiatan yang kurang produktif. Masyarakat lebih memilih menyimpan kekayaan melalui praktik penimbunan (hoarding) dalam bentuk aset seperti tanah, properti, logam mulia, maupun valuta asing, daripada menginvestasikannya pada sektor riil yang mampu menghasilkan nilai tambah secara berkelanjutan.

Dalam tradisi ekonomi Islam klasik, konsep inflasi tidak dikenal secara tegas karena kestabilan nilai uang dijaga melalui penggunaan dinar dan dirham yang berbasis emas dan perak. Meskipun demikian, penurunan daya beli mata uang tetap berpotensi terjadi, misalnya apabila nilai emas sebagai dasar nilai dinar berkurang sebagai konsekuensi dari penemuan cadangan emas yang signifikan. Namun, peluang terjadinya kondisi tersebut relatif kecil.

Al-Maqrizi, seorang pemikir ekonomi Muslim dan murid Ibnu Khaldun, membagi inflasi ke dalam dua kategori utama, yakni inflasi yang muncul akibat kelangkaan barang (natural inflation) dan inflasi yang bersumber dari kesalahan manusia (human error inflation). Berdasarkan catatan sejarah, inflasi pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin tergolong sebagai inflasi alamiah yang dipicu oleh faktor eksternal, seperti bencana kekeringan dan konflik peperangan.

Hal ini sebagaimana tercermin dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Asy-Syaukani, ketika masyarakat meminta Rasulullah SAW untuk menetapkan harga akibat kenaikan harga barang. Rasulullah SAW menegaskan bahwa Allah SWT-lah yang menentukan harga, melapangkan dan menyempitkan rezeki, serta beliau berharap bertemu Allah tanpa membawa kezaliman terhadap siapa pun, baik dalam urusan darah maupun harta.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa kenaikan harga pada saat itu dipahami sebagai inflasi yang bersifat alamiah dan berada dalam ketetapan Allah SWT. Oleh karena itu, intervensi langsung pemerintah dalam mekanisme harga dinilai berpotensi menimbulkan distorsi pasar (Suharti, 2021). Peran pemerintah lebih diarahkan pada pengawasan pasar, pencegahan praktik penimbunan, serta memastikan kelancaran distribusi barang agar pasar tetap berjalan secara adil dan efisien.

Lebih jauh, hadis ini juga menjadi bukti bahwa fenomena inflasi telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW, di mana kenaikan harga barang pada saat itu telah menimbulkan kesulitan ekonomi bagi sebagian masyarakat dan mengganggu kestabilan perekonomian.

Perbedaan Inflasi dalam Perspektif Islam dan Konvensional

Perbedaan pandangan mengenai inflasi antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional mencerminkan perbedaan mendasar dalam kerangka filosofis dan sistem ekonomi yang dianut keduanya. Dalam pendekatan konvensional, inflasi umumnya dijelaskan melalui faktor-faktor ekonomi modern yang berkembang seiring perubahan zaman. Sebaliknya, dalam perspektif Islam, faktor-faktor tersebut tidak selalu diposisikan sebagai penyebab utama inflasi, melainkan lebih sering dipahami sebagai dampak dari kesalahan manusia dalam pengelolaan sistem ekonomi.

Ekonomi Islam memandang inflasi sebagai konsekuensi dari perilaku manusia dan struktur biaya yang tidak sehat. Bentuk inflasi buatan dapat muncul melalui kebijakan insentif tertentu, seperti variasi produksi pangan, pengendalian harga, kebijakan upah atau gaji, serta pembentukan ekspektasi ekonomi baik yang bersifat adaptif maupun prospektif. Berbeda dengan pandangan konvensional yang cenderung menerima sistem ekonomi modern sebagai sesuatu yang netral, perspektif Islam menilai bahwa banyak praktik dalam sistem tersebut justru berpotensi memicu inflasi.

Inflasi dari sisi permintaan, menurut ekonomi Islam, dipengaruhi oleh berbagai persoalan struktural seperti praktik korupsi, penipuan, lemahnya tata kelola pemerintahan, beban pajak yang berlebihan, serta penerapan sistem mata uang fiat. Selain itu, sistem perbankan cadangan

fraksional, penggunaan kartu kredit, dan transaksi derivatif tanpa aset pendukung juga dinilai memperbesar tekanan inflasi. Oleh karena itu, inflasi dipahami sebagai akibat dari kegagalan sistemik dalam tata kelola ekonomi dan keuangan konvensional yang berlaku saat ini.

Sebagai solusi, ekonomi Islam menawarkan alternatif sistem yang lebih berkeadilan dan stabil. Praktik korupsi, penipuan, administrasi yang tidak efisien, serta perpajakan berlebihan perlu dikoreksi secara menyeluruh. Mata uang fiat dapat digantikan dengan standar emas atau aset riil, sistem perbankan cadangan fraksional dapat dialihkan ke sistem cadangan penuh atau perbankan sempit, penggunaan kartu kredit dapat diubah menjadi kartu debit, dan transaksi derivatif dapat digantikan dengan instrumen yang memiliki underlying asset seperti surat berharga atau sukuk.

Jenis-Jenis Inflasi dan Dampaknya

Inflasi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan karakteristik, penyebab, dan sumber terjadinya. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap dinamika inflasi serta dampaknya terhadap perekonomian.

1. Inflasi Berdasarkan Karakteristik Perkembangannya

a) Inflasi ringan (creeping inflation)

Inflasi jenis ini ditandai oleh tingkat kenaikan harga yang relatif rendah, umumnya berada di bawah 10 persen per tahun. Pergerakan perubahan harga terjadi perlahan-lahan, dalam skala kecil, dan berlangsung selama periode yang cukup panjang sehingga dampaknya terhadap kegiatan ekonomi masih tergolong ringan.

b) Inflasi sedang (galloping inflation)

Inflasi sedang ditunjukkan oleh lonjakan harga yang cukup signifikan, biasanya berada pada kisaran dua hingga tiga digit. Kenaikan harga dapat terjadi dalam periode yang relatif singkat dan bersifat terus meningkat dari waktu ke waktu. Dampak inflasi ini terhadap perekonomian lebih serius dibandingkan inflasi ringan karena menurunkan daya beli masyarakat secara cepat.

c) Inflasi Berat (Hyperinflation)

Inflasi berat merupakan tingkat inflasi yang paling parah. Pada kondisi ini, harga barang dan jasa meningkat secara drastis dan dapat berlipat ganda dalam waktu relatif singkat. Masyarakat cenderung menghindari penyimpanan uang tunai karena nilai tukarnya terus merosot, sehingga uang segera dibelanjakan atau ditukarkan pada komoditas. Sirkulasi uang berlangsung sangat cepat dan kenaikan harga terjadi secara berkelanjutan dan semakin cepat. Fenomena ini umumnya muncul negara menghadapi kekurangan anggaran yang besar, contohnya karena konflik atau peperangan, yang kemudian ditutup melalui kebijakan pencetakan uang secara berlebihan.

2. Inflasi Berdasarkan Faktor Penyebab

a) Inflasi Tarikan Permintaan (Demand-Pull Inflation)

Jenis kenaikan harga ini disebabkan oleh bertambahnya permintaan agregat sementara kapasitas produksi perekonomian berada pada atau mendekati tingkat kesempatan kerja penuh. Dalam kondisi tersebut, tambahan permintaan tidak lagi memacu peningkatan output, melainkan hanya menyebabkan kenaikan harga. Ketika permintaan melampaui kemampuan produksi pada tingkat kesempatan kerja penuh, terbentuk kesenjangan inflasi (inflationary gap) yang menjadi sumber utama terjadinya inflasi.

b) Inflasi Dorongan Biaya (Cost-Push Inflation)

Inflasi dorongan biaya ditandai dengan kenaikan tingkat harga yang disertai dengan penurunan volume produksi. Kondisi ini sering muncul bersamaan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi atau bahkan resesi. Inflasi ini bermula dari meningkatnya biaya produksi, yang mengakibatkan berkurangnya penawaran agregat sehingga harga naik, sementara jumlah output justru mengalami penurunan.

3. Inflasi Berdasarkan Sumber Terjadinya

a) Inflasi domestik (domestic inflation)

Inflasi dalam negeri muncul akibat faktor-faktor internal, seperti pembiayaan defisit anggaran melalui pencetakan uang baru, kegagalan panen, atau gangguan produksi lainnya yang menekan ketersediaan barang di pasar.

b) Inflasi impor (imported inflation)

Inflasi impor terjadi ketika peningkatan harga barang di pasar internasional merambat ke dalam perekonomian domestik, khususnya pada negara dengan sistem ekonomi terbuka. Dampak inflasi ini antara lain meningkatnya biaya hidup akibat konsumsi barang impor, naiknya biaya produksi karena penggunaan bahan baku impor, serta bertambahnya beban pengeluaran pemerintah maupun sektor swasta untuk menyesuaikan diri dengan kenaikan harga barang impor tersebut.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Inflasi

Inflasi dipandang sebagai gejala moneter karena berkaitan dengan melemahnya nilai satuan uang sebagai alat ukur terhadap barang dan jasa. Fenomena ini umumnya muncul akibat berbagai kondisi ekonomi yang memengaruhi keseimbangan antara permintaan, penawaran, dan jumlah uang yang beredar.

1. Peningkatan Permintaan

Lonjakan permintaan agregat dapat menimbulkan inflasi tarikan permintaan (demand-pull inflation), yaitu kondisi permintaan atas komoditas dan jasa tumbuh lebih cepat daripada kapasitas produksi yang tersedia. Situasi ini antara lain dipengaruhi dari peningkatan pengeluaran pemerintah, naiknya permintaan dari luar negeri melalui ekspor, serta bertambahnya permintaan yang berasal dari sektor swasta.

2. Peningkatan Biaya Produksi

Inflasi juga dapat bersumber dari kenaikan biaya produksi yang dikenal sebagai inflasi dorongan biaya (cost-push inflation). Keadaan ini umumnya disebabkan oleh meningkatnya harga bahan baku dalam proses produksi serta kenaikan biaya tenaga kerja atau upah. Sebagai konsekuensinya, produsen menyesuaikan harga jual ke tingkat yang lebih tinggi guna menutup tambahan biaya yang dikeluarkan.

3. Pertumbuhan Jumlah Uang Beredar

Kenaikan tingkat inflasi dapat muncul apabila peredaran uang di masyarakat melampaui kebutuhan riil perekonomian. Peningkatan daya beli yang tidak diiringi dengan pertumbuhan produksi barang dan jasa mendorong pelaku usaha menaikkan harga. Kenaikan harga barang tersebut kemudian diikuti oleh kenaikan harga jasa. Kondisi ini sering kali dipicu oleh kebijakan defisit anggaran pemerintah yang dibiayai melalui penerbitan atau pencetakan uang baru.

Baik inflasi tarikan permintaan maupun inflasi dorongan biaya pada dasarnya memengaruhi interaksi antara penawaran dan permintaan. Sebab-sebab struktural pada kenaikan jumlah penduduk, kenaikan pemasukan masyarakat, serta perubahan pola dan preferensi konsumsi juga turut memperkuat tekanan inflasi dalam perekonomian.

Implikasi Inflasi terhadap Stabilitas Ekonomi

Inflasi yang berada pada tingkat tinggi dan berlangsung secara persisten memberikan pengaruh yang signifikan pada stabilitas ekonomi dan tatanan kehidupan masyarakat. Apabila harga barang dan jasa meningkat tanpa diiringi tingkatan pendapatan riil menimbulkan menurunnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dampak ini paling dirasakan oleh kelompok berpendapatan rendah, sehingga inflasi berpotensi memperbesar angka kemiskinan dan memperlebar kesenjangan sosial. Selain itu, ketidakstabilan harga juga menimbulkan ketidakpastian ekonomi yang dapat mengganggu aktivitas konsumsi, tabungan, dan investasi, serta berimplikasi pada melemahnya stabilitas sosial dan ekonomi secara keseluruhan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut dipandang sebagai bentuk ketidakseimbangan yang bertentangan dengan prinsip keadilan ('adl) dan tujuan kesejahteraan (falah) yang menjadi landasan utama sistem ekonomi Islam. Islam menekankan pentingnya perlindungan terhadap nilai harta (hifz al-māl) dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara adil. Oleh karena itu, inflasi yang menggerus nilai uang dan menurunkan daya beli

masyarakat dinilai sebagai ancaman terhadap tercapainya tujuan-tujuan syariah (maqāsid al-syarī'ah), khususnya dalam menjaga kesejahteraan dan stabilitas sosial.

Berdasarkan kerangka tersebut, pengendalian inflasi dalam ekonomi Islam tidak hanya dimaknai sebagai upaya teknis untuk menekan kenaikan harga, tetapi juga sebagai bagian dari strategi menjaga keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial. Kebijakan pengendalian inflasi diarahkan untuk melindungi kelompok masyarakat rentan, memastikan distribusi pendapatan yang lebih merata, serta menjaga keseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil. Dengan demikian, pengendalian inflasi dalam perspektif Islam merupakan instrumen penting dalam mewujudkan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan dan selaras dengan nilai-nilai syariah.

Contoh Kasus Inflasi di Indonesia

1. Inflasi akibat Peningkatan Harga BBM

Salah satu bentuk inflasi yang kerap terjadi di Indonesia adalah inflasi yang disebabkan karena kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Peningkatan harga BBM berefek ke naiknya biaya transportasi serta penyaluran barang, sehingga harga kebutuhan pokok maupun jasa turut mengalami peningkatan. Fenomena ini tergolong sebagai cost-push inflation, karena kenaikan biaya produksi dan distribusi memaksa produsen menyesuaikan harga jual ke tingkat yang lebih tinggi.

2. Inflasi Menjelang Hari Besar Keagamaan

Inflasi musiman kerap terjadi menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Peningkatan permintaan terhadap bahan pangan seperti beras, daging, telur, minyak goreng, dan gula menyebabkan harga-harga naik. Fenomena ini tergolong demand-pull inflation, karena lonjakan permintaan masyarakat tidak diimbangi dengan peningkatan pasokan barang dalam jangka pendek.

3. Inflasi Akibat Gangguan Produksi Pangan

Kasus inflasi juga pernah terjadi akibat gagal panen yang disebabkan oleh cuaca ekstrem, seperti kekeringan atau banjir. Berkurangnya pasokan beras, cabai, dan bawang merah menyebabkan harga komoditas pangan melonjak. Inflasi jenis ini berkaitan dengan penurunan penawaran agregat, yang mendorong kenaikan harga secara umum.

4. Inflasi Karena Kenaikan Tarif Listrik dan Gas

Penyesuaian tarif listrik atau harga gas rumah tangga turut berkontribusi terhadap inflasi. Kenaikan biaya energi berdampak langsung pada rumah tangga dan dunia usaha, sehingga biaya produksi meningkat dan harga barang maupun jasa mengalami penyesuaian ke atas.

5. Inflasi Impor akibat Kenaikan Harga Internasional

Selain dipengaruhi oleh faktor domestik, Indonesia juga menghadapi inflasi bersumber dari luar negeri atau imported inflation. Kondisi ini disebabkan harga komoditas global seperti gandum, minyak mentah, dan pupuk mengalami kenaikan. Peningkatan harga barang impor tersebut berdampak pada naiknya biaya produksi di dalam negeri, khususnya pada sektor industri yang sangat bergantung pada bahan baku impor.

6. Inflasi akibat Depresiasi Nilai Tukar Rupiah

Pelemahan kurs rupiah pada valuta asing menyebabkan harga barang impor meningkat. Kenaikan harga tersebut tidak hanya memengaruhi barang konsumsi, tetapi juga bahan baku industri, sehingga mendorong peningkatan biaya produksi dan pada akhirnya berkontribusi terhadap naiknya tingkat inflasi domestik.

Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Dampak Inflasi

Inflasi merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang harus dikendalikan karena dapat memberikan pengaruh buruk terhadap kestabilan perekonomian secara keseluruhan. Sehingga, keterlibatan pemerintah menjadi sangat penting dalam menekan laju inflasi melalui penerapan berbagai kebijakan strategis, baik yang bersifat moneter, fiskal, maupun kebijakan lainnya di luar sektor moneter.

1. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter dapat dipahami sebagai upaya pemerintah dalam memengaruhi kondisi perekonomian nasional, khususnya tingkat pemasukan negara, melalui mengendalikan

kapasitas uang tersebar di tengah masyarakat (Ghofur, 2007: 140). Di Indonesia, pelaksanaan kebijakan moneter menjadi tanggung jawab Bank Indonesia yang dijalankan melalui sejumlah instrumen utama.

Pertama, kebijakan suku bunga atau politik diskonto, yaitu upaya menaikkan tingkat bunga kredit. Kenaikan suku bunga menyebabkan biaya pinjaman menjadi lebih mahal, sehingga aktivitas ekonomi yang bergantung pada dana pinjaman dapat ditekan. Dengan demikian, permintaan agregat dapat dikendalikan.

Kedua, kebijakan pasar terbuka (open market operation) yang dilakukan melalui penjualan surat-surat berharga di pasar keuangan. Kebijakan ini bertujuan guna mengurangi kelebihan peredaran uang di masyarakat sehingga tekanan inflasi dapat dikurangi (Ghofur, 2007: 140).

Ketiga, penetapan cadangan wajib minimum (cash ratio), yaitu kewajiban bagi bank umum guna menyimpan separuh dana mereka di bank sentral. Besarnya cadangan ditentukan oleh kebijakan bank sentral atau pemerintah, dan berfungsi untuk mengendalikan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit (Ghofur, 2007: 141).

2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal berpengaruh dengan pengelolaan pemasukan dan pengeluaran pemerintah. Dalam rangka mengendalikan inflasi, pemerintah dapat menerapkan langkah-langkah fiskal tertentu. Salah satu bentuk kebijakan fiskal adalah melakukan penghematan atau pengurangan belanja negara, sehingga tekanan terhadap permintaan agregat dapat ditekan. Selain itu, pemerintah juga dapat meninggikan biaya pajak guna menurunkan daya tarik masyarakat, pada akhirnya berefek penurunan permintaan barang dan jasa (Ghofur, 2007: 141).

3. Kebijakan Non-Moneter

Selain kebijakan moneter maupun fiskal, pemerintah juga dapat menerapkan kebijakan non-moneter sebagai langkah pendukung dalam pengendalian inflasi. Kebijakan ini antara lain diarahkan pada peningkatan kapasitas produksi, pengaturan upah, serta pengawasan terhadap harga dan distribusi barang agar tidak terjadi lonjakan harga di pasar.

Peningkatan produksi dilakukan melalui penetapan prioritas sektor-sektor strategis atau pemberian subsidi kepada sektor tertentu, seperti produksi bahan bakar dan beras, guna menjaga ketersediaan barang pokok di pasar. Di samping itu, kebijakan pengupahan juga diterapkan sebagai upaya menjaga stabilitas upah atau gaji. Kenaikan upah yang terlalu sering berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat secara berlebihan, sehingga dapat mendorong kenaikan permintaan agregat dan memicu inflasi (Ghofur, 2007: 141).

Inflasi tinggi yang berlangsung secara terus-menerus memiliki implikasi serius terhadap stabilitas ekonomi dan sosial suatu negara. Kenaikan harga yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan riil menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpendapatan tetap dan masyarakat miskin. Kondisi ini memicu peningkatan tingkat kemiskinan serta memperlebar kesenjangan distribusi pendapatan. Selain itu, inflasi yang tidak stabil menciptakan ketidakpastian ekonomi yang berdampak negatif terhadap keputusan konsumsi, tabungan, dan investasi, sehingga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan melemahkan stabilitas makroekonomi.

Dalam perspektif Islam, dampak inflasi tersebut dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan (*‘adl*) dan tujuan kesejahteraan (*falah*) yang menjadi landasan utama sistem ekonomi Islam. Inflasi yang merugikan kelompok rentan menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam sistem ekonomi serta kegagalan dalam melindungi hak-hak masyarakat. Islam menekankan pentingnya menjaga nilai harta (*hifz al-māl*) dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, inflasi yang menggerus nilai uang dan mengurangi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok dipandang sebagai ancaman terhadap tujuan-tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī‘ah*).

Berdasarkan kerangka tersebut, pengendalian inflasi dalam ekonomi Islam tidak sekedar berfungsi menjaga stabilitas harga, melainkan menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan pengendalian inflasi harus diarahkan untuk melindungi daya beli masyarakat, mendorong distribusi pendapatan yang adil,

serta memastikan keseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil. Dengan demikian, pengendalian inflasi dalam perspektif Islam merupakan instrumen strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus merealisasikan nilai-nilai syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

KESIMPULAN

Inflasi merupakan fenomena ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas ekonomi, daya beli masyarakat, dan kesenjangan sosial. Dalam perspektif ekonomi Islam, inflasi bukan sekedar disebabkan oleh faktor moneter, tetapi juga praktik yang menyimpang dari prinsip syariah, seperti riba, penimbunan barang (ihtikar), dan spekulasi berlebihan (maysir), yang dapat merusak keadilan sosial.

Faktor-faktor penyebab inflasi menurut ekonomi Islam meliputi riba, yang mendorong akumulasi kekayaan secara tidak proporsional; penimbunan barang yang menciptakan kelangkaan; spekulasi berlebihan; serta lemahnya peran negara dalam pengawasan pasar dan distribusi. Praktik-praktik ini tidak hanya menimbulkan kenaikan harga, tetapi juga memperlebar kesenjangan sosial.

Pendekatan ekonomi Islam untuk mengendalikan inflasi mencakup penguatan sektor riil, penghapusan riba, pengoptimalan zakat, infak, dan wakaf, serta peran aktif negara dalam menjaga keseimbangan pasar. Sistem keuangan berbasis bagi hasil mendorong investasi produktif dan menekan spekulasi.

Inflasi yang tinggi dapat mengurangi motivasi menabung, mendorong konsumsi berlebihan, dan mengarahkan investasi ke sektor tidak produktif. Oleh karena itu, pengendalian inflasi dalam kerangka Islam menjadi sarana mewujudkan keadilan sosial, pemerataan pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Dengan penerapan prinsip ekonomi Islam, tekanan inflasi dapat diminimalkan, stabilitas ekonomi diperkuat, dan tujuan syariah, yaitu keadilan ('adl) dan kesejahteraan (falah), tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 167.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, hlm. 5.
- Chapra, M. U. *Islamic Economics: What It Is and How It Developed*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2000, hlm. 45.
- Karim, A. A. (2015). *Ekonomi makro Islam (Ed. Revisi)*. Rajawali Pers.
- Nasution, A. W., & Majid, M. S. A. (2023). Inflasi dan stabilitas ekonomi: Analisis perbandingan perspektif Islam dan konvensional. *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 23(2), [hal 242]. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i2.15902>
- Putri, N.H & Juliana, J. (2025). Konsep Inflasi dalam Perspektif al-Maqrizi dan Implikasinya terhadap Kebijakan Ekonomi Islam Modern. Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, Universitas Pendidikan Indonesia. 4-5
- Qardhawi, Y. (2001). *Peran nilai dan moral dalam perekonomian Islam*. Gema Insani Press.
- Romadhan, R. A., Serli, S., Aghliyah, S. P., Oktanti, R. A., & Putra, T. R. (2024). Pemikiran Al-Maqrizi dan Keynesian tentang teori perbandingan inflasi dalam perspektif Islam dan konvensional. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 5(2), 211. <https://doi.org/10.21107/bep.v5i2.25933>
- Siddiqi, M. N. *Issues in Islamic Banking*. Leicester: Islamic Foundation, 2006, hlm. 55.
- Surono, S., Natsir, I., & Hany, I. (2022). Inflasi ditinjau dari ekonomi konvensional dan ekonomi Islam: Tantangan stabilitas mata uang rupiah. *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 4(2), 145. <https://doi.org/xx.xxxxx>
- Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 85.